

KATA SAMBUTAN

HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Dilengkapi dengan Hukum Bisnis
dalam Perspektif Syariah

WALDI NOPRIANSYAH, S.H.I., M.S.I.

KENCANA

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 RUANG LINGKUP PENGERTIAN	7
A. Pengertian Hukum	7
B. Pengertian Bisnis	8
C. Pengertian Hukum Bisnis dan Fungsinya	9
D. Hubungan Manajemen dan Bisnis	9
E. Bisnis dalam Islam	11
F. Hubungan Manajemen dan Bisnis dalam Islam	15
G. Tujuan Bisnis dalam Al-Qur'an dan Hadis	18
H. Perbedaan Bisnis konvensional dan Bisnis Syariah	20
Soal Individu dan Kelompok	22
BAB 3 ATURAN HUKUM	25
A. Sistem Hukum Perdata di Indonesia	25
B. Implementasi Penerapan Hukum dalam Kegiatan Bisnis	27
C. Subjek dan Objek Hukum	27
D. Sumber-sumber Hukum Bisnis	32

E. Sumber-sumber Hukum Bisnis Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia	34
F. Landasan Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an	37
Soal Individu dan Kelompok	40
 BAB 4 HUKUM JAMINAN ATAU KAFALAH	 43
A. Pengertian Hukum Jaminan	43
B. Landasan Hukum Jaminan	45
C. Jenis-jenis Jaminan	46
D. Lembaga Jaminan di Indonesia	47
E. Fungsi Jaminan	61
F. Definisi Hukum Jaminan Syariah (Kafalah)	62
Soal Individu atau Kelompok	68
 BAB 5 HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK)	 71
A. Pengertian Hukum Perjanjian (Kontrak)	71
B. Jenis-jenis Perjanjian/Kontrak	73
C. Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak	76
D. Contoh Surat Perjanjian	78
E. Prestasi	83
F. Wanprestasi	85
G. Unsur-unsur dalam Perjanjian/Kontrak	87
H. Batalnya Suatu Perjanjian	88
I. Pengertian Hukum Perjanjian (Kontrak) dalam Islam	91
J. Asas-asas Perjanjian dalam Islam dan Hukum Positif	93
K. Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak dalam Islam	95
L. Contoh Perjanjian/Kontrak dalam Islam	95
Soal Individu dan Kelompok	101
 BAB 6 BENTUK-BENTUK ORGANISASI DALAM BISNIS DAN PROSEDUR PENDIRIANNYA	 103
A. Pengertian Usaha, Pengusaha, dan Perusahaan	105
B. Firma	106
C. Commanditaire Vennotschap (CV)	108
D. Perseroan Terbatas (PT)	112

E. Syarat Izin Pendirian Perusahaan Bank	117
F. Syarat Izin Pendirian Perusahaan Asuransi	121
G. Syarat Izin Pendirian Pegadaian	122
H. Syarat Izin Pendirian Koperasi	123
I. Syarat Pendirian Lembaga Keuangan Mikro	128
J. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	129
K. Modal Pendirian Perusahaan Konvensional dan Perusahaan Syariah	137
L. Alasan Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) Bukan Badan Hukum	140
M. Contoh Kasus dan Pencabutan Izin Usaha yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	141
Soal Individu dan Kelompok	156

BAB 7 PENILAIAN KESEHATAN DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

A. Penilaian Kesehatan Perusahaan	161
B. Merger	162
C. Akuisisi	168
D. Konsolidasi	172
E. Persyaratan untuk Melakukan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi	175
F. Alasan Perusahaan Melakukan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi	175
Soal Individu dan Kelompok	177

BAB 8 KEPAILITAN ATAU TAF LIS

A. Pengertian Pailit	180
B. Dasar Hukum Kepailitan	182
C. Asas-asas Kepailitan	182
D. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pailit	183
E. Pihak-pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit	184
F. Syarat-syarat dalam Mengajukan Permohonan Pailit	184
G. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	185

H. Tata Cara Melakukan Pailit	186
I. Upaya Hukum dan Akibat Hukum dalam Pailit	189
J. Pengurusan Harta Pailit	191
K. Kepailitan (Taflis) dalam Pandangan Ekonomi Syariah	193
L. Dasar Hukum Pailit (Taflis)	194
M. Penetapan Seseorang Jatuh Pailit	194
N. Pengurusan Harta Pailit dalam Perspektif Islam	195
O. Perlunya Pengadilan Niaga Syariah di Indonesia	198
Soal Individu dan Kelompok	199
BAB 9 PERLINDUNGAN KONSUMEN	201
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	201
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	204
C. Asas-asas Perlindungan Konsumen	205
D. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen	206
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	207
F. Larangan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha	210
G. Syarat Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan oleh OJK	211
H. Kerahasiaan Data dan Informasi Konsumen	212
I. Sanksi terhadap Pelaku Usaha yang Membuka Data dan Informasi Konsumen	214
Soal Individu dan Kelompok	216
BAB 10 LEMBAGA PENGAWASAN	219
A. Otoritas Jasa Keuangan	220
B. Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah	224
Soal Individu dan Kelompok	228
BAB 11 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS	229
A. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi (Extraordinary Court)	230
B. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Ordinary Court)	231
C. Penyelesaian Sengketa di Arbitrase Syariah	233

D. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama	240
Soal Individu dan Kelompok	245

DAFTAR PUSTAKA	247
TENTANG PENULIS	255

Bab 1. Hukum Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam	20
Bab 2. Sumber-sumber Hukum Islam	34
Bab 3. Sumber-sumber Hukum Bisnis Syariah di Indonesia	38
Bab 4. Jaminan Kewajiban	67
Bab 5. Jaminan Syariah (Klasik)	87
Bab 6. Contoh Alat Pembiayaan Syariah	111
Bab 7. Pengembangan Syariah dan Keuangan	128
Bab 8. Prosedur Penganggaran dalam Keuangan Syariah (Islam)	139

Bab 1. Investasi yang Diatur oleh DFI	14
Bab 2. Perbedaan antara Internasional dan Syariah	21
Bab 3. Kewajiban RUPA, DFI, dan DFI	113
Bab 4. Model Dasar Pembiayaan Perusahaan Kewajiban dan Syariah	116
Bab 5. Contoh Pembiayaan dan Bank yang Menger	147
Bab 6. Perusahaan yang telah Utang	177
Bab 7. Perusahaan yang telah Utang dan Bank	177